

Tetap Bertumbuh Meski Ekonomi Melambat

CATU

Bersama LPD, Membangun Pecatu



LPD

SA ADAT PE

Meluruskan Salah
Kaprah tentang LPD

'Catu' di Hati 'Krama'

Tidak kebahagiaan yang lebih besar bagi sebuah media selain mendapat tanggapan dari pembacanya. Terlebih lagi sambutan pembaca itu bersifat positif. Tidak sia-sia segala usaha dan kerja keras yang mendahului tatkala media diterbitkan mampu merebut mata dan hati pembaca.

Itu pula yang terjadi pada majalah *Catu* ini. Dua edisi yang telah terbit pada tahun lalu dan awal tahun ini tidak saja mampu menyedot perhatian pembaca yang *nota bene krama* Desa Adat Pecatu, tetapi juga berhasil memancing terbukanya ruang dialog mengenai berbagai permasalahan yang tengah dihadapi Pecatu kini.

Hal itu bisa terekam dari komentar sejumlah warga manakala bertemu dengan para pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Pecatu. Bahkan, beberapa artikel Kepala LPD Desa Adat Pecatu, I Ketut Giriarta, S.Pd., M.M., di halaman “Kolom” berkali-kali disitir dalam diskusi-diskusi informal anak-anak muda Pecatu. “Kata Pak Ketut Giriarta, kalau kita ingin maju, harus berani berutang,” celoteh seorang anak muda Pecatu yang disambut tawa ceria rekan-rekannya. Pada kesempatan berbeda, seorang warga yang bertemu dengan Ketut Giriarta langsung menanggapi artikelnya yang berjudul “Tanah Itu ‘Sanan’”. “Wah, Pak Ketut terlambat, tanah di Pecatu sudah hampir habis.” Terakhir, seorang warga sampai meminta agar staf redaksi bisa memuat kiprah usahanya di majalah ini.

Semua itu menunjukkan majalah *Catu* mulai berada di hati *krama* Desa Adat Pecatu. Mereka tidak hanya membaca, tetapi juga memberikan tanggapan atas isi yang disajikan majalah ini. Tentu ini sesuatu yang diharapkan sejak majalah *Catu* mulai dirancang.

Itu sebabnya, kami berketetapan hati untuk terus menerbitkan *Catu*, secara rutin, minimal dua kali setahun. Kami ingin tetap menghadirkan sajian yang informatif, edukatif serta inspiratif bagi *krama* Desa Adat Pecatu. Sajian semacam ini luput dari perhatian media massa umum, terlebih lagi yang secara khusus mengungkap tentang dinamika *krama* Desa Adat Pecatu.



Pada edisi ketiga ini, kami menampilkan laporan khusus seputar *linggih* (kedudukan) dan *sasana* (tata kelola) LPD yang menyebabkannya berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya. Laporan ini untuk meluruskan salah kaprah yang selama ini berkembang tentang LPD. Banyak orang menganggap LPD sama dengan bank, koperasi atau lembaga keuangan mikro (LKM), padahal hakikat, tujuan, dan fungsinya berbeda. LPD merupakan lembaga *duwe* (milik) desa adat yang khas, unik dan otentik.

Seperti edisi-edisi sebelumnya, artikel dan laporan edukatif dan inspiratif juga tetap kami hadirkan untuk memotivasi *krama* Desa Adat Pecatu terus bergiat dalam usaha dan aktivitasnya.

Teriring ucapan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan (15–25 Juli 2015), kami sampaikan selamat menikmati sajian kami edisi ketiga ini. Semoga bermanfaat!

Redaksi

REDAKSI



PELINDUNG: Bendesa Adat Pecatu, I Ketut Murdana, **PENANGGUNG JAWAB:** Kepala LPD Desa Adat Pecatu, I Ketut Giriarta, S.Pd., M.M., **REDAKSI:** I Nyoman Yoga Puniantara, A.Md., I Made Sujaya. **PENERBIT:** LPD Desa Adat Pecatu. **ALAMAT REDAKSI:** Jalan Goa Lempeh, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Telp. (0361) 702078/702133/8470918, Fax. (0361) 703344, Surat Elektronik (e-mail): pecatu.lpd@gmail.com <https://lpdpecatu.or.id>

MELURUSKAN SALAH KAPRAH TENTANG LPD

Hingga kini masih muncul salah kaprah di kalangan masyarakat mengenai keberadaan LPD. Masih banyak yang menganggap LPD sama dengan bank, koperasi atau lembaga keuangan sejenis lainnya. Padahal, LPD sejatinya lembaga adat milik komunitas adat Bali (desa adat/desa pakraman) yang meskipun menjalankan fungsi keuangan dan ekonomi, memiliki banyak perbedaan prinsip dengan bank, koperasi maupun lembaga keuangan mikro (LKM). Dalam Undang-Undang (UU) No. 1 tahun 2013 pun secara tegas dinyatakan LPD tidak tunduk kepada UU itu karena diatur berdasarkan hukum adat.

Bendesa Adat Pecatu, I Ketut Murdana mengungkapkan jika dilihat praktiknya memang LPD terlihat sama dengan lembaga keuangan umum. Padahal, kenyataannya ada banyak perbedaan. Malah, LPD merupakan lembaga yang sangat unik yang membuatnya berbeda

dengan lembaga keuangan umum.

“LPD itu dimiliki *krama desa*, tetapi *krama desa* sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk modal LPD. Namun, begitu LPD mendapatkan laba, seluruh *krama desa* ikut menikmati



Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., Ak., M.Si.

melalui dana pembangunan desa adat maupun program-program LPD lainnya,” kata Murdana.

Hal ini ditegaskan Guru Besar Fakultas Ekonomi Unud yang juga anggota Badan Pengawas (BP) LPD Desa Adat Pecatu, Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., Ak., M.Si. Pemupukan modal LPD berasal dari komunitas adat Bali yakni desa adat, tidak berasal dari orang per orang seperti bank, koperasi maupun LKM.

“Karena pemupukan modal berasal dari komunitas, hasil pengelolaan usaha pun dikembalikan kepada komunitas dan dipertanggungjawabkan kepada komunitas melalui *paruman desa* sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi komunitas adat Bali di desa adat,” kata Suartana.

Kepala LPD Desa Adat Pecatu, I Ketut Giriarta, S.Pd., M.M., menambahkan modal terpenting LPD bukan semata dalam bentuk uang, tetapi modal sosial

berupa semangat *pasikian pasobayan*, *pasidikaran*, *ngayah* dan *lascarya*. Karena itu, meskipun dibentuk lembaga serupa di tempat lain, belum tentu bisa berhasil seperti LPD karena akar kulturalnya yang berbeda.

“Perbedaan prinsip LPD dengan bank, koperasi dan LKM adalah sifat usaha yang non-profit. Bila pun ada laba (*labda*), semua itu dikembalikan ke komunitas berupa dana pembangunan desa adat sebesar 20% dan dana sosial sebesar 5%. Jadi, tidak ada laba yang dibagi kepada pemilik,” kata Giriarta.

Meski praktik usaha LPD terlihat sama dengan lembaga keuangan umum, bukan berarti LPD menjiplak keberadaan lembaga keuangan umum itu. Menurut Giriarta, LPD memiliki akar kultural yang kuat. Sejak lama, masyarakat adat Bali melakukan kegiatan simpan pinjam di banjar atau *sekaa* yang dikenal dengan nama *pacingkremen* dan *patus*. Tradisi inilah yang diadopsi Gubernur Bali IB Mantra saat menginisiasi pembentukan LPD.

“Sampai sekarang tradisi *pacingkremen* dan *patus* di banjar masih berlangsung. LPD merupakan modernisasi sekaligus pelembagaan dari tradisi yang sudah berlangsung sejak berabad-abad lamanya,” kata Giriarta.

Sayangnya, imbuhan Giriarta, selama ini masih berkembang salah kaprah mengenai LPD di kalangan *krama desa*, bahkan juga di kalangan para pengelola LPD sendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai hakikat LPD selain karena memang LPD sebagai strategi pemertahanan adat dan budaya Bali yang tidak serta merta bisa dipahami masyarakat awam.

Karena itu, Murdana dan Giriarta mengajak *krama* Desa Adat Pecatu untuk menghentikan salah kaprah mengenai LPD. Jangan pernah lagi menyamakan LPD dengan bank, koperasi apalagi LKM. LPD adalah wadah khusus, unik dan otentik milik *krama* desa adat di bawah naungan desa adat.

“Lembaga-lembaga keuangan yang ada di Pecatu jangan juga menganggap LPD sebagai saingan. Ini milik kita bersama sebagai *krama* Desa Adat Pecatu. Mari kita bergandengan tangan membangun Desa Adat Pecatu yang lebih baik,” tandas Giriarta. •

PERBEDAAN LPD, BPR, DAN KOPERASI

Karakteristik	LPD	BPR	Koperasi
Landasan pendirian	Hukum adat/awig-awig	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998/Undang-Undang Perbankan	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992/Undang-Undang Perkoperasian
Inisiatif pembentukan	Krama/Warga desa adat	Pribadi/Kelompok	Pribadi/Kelompok
Cara memperoleh modal	Sumbangan pemerintah dan sumbangan sukarela dari warga desa adat sesuai keikhlasan	Melalui dana dari para pemegang saham dan sektor-sektor lain yang sah	Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 1.Modal sendiri, terdiri dari : simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah. 2.Modal pinjaman, terdiri dari : anggota, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya, sumber-sumber lain yang sah
Perangkat organisasi	Perangkat organisasi LPD : 1.Paruman Desa Pakraman 2.Prajujur atau bendesa adat (ketua badan pengawas) 3. <i>Manggala</i> (Ketua) LPD 4. <i>Juru Surat</i> (Kepala Bidang Penatausahaan) 5. <i>Juru Raksa</i> (Kepala Bidang Keuangan) 6.Staf	Perangkat organisasi BPR : 1.Rapat Umum Pemegang Saham 2.Komisaris 3.Direksi 4.Staf-staf pendukung	Perangkat organisasi koperasi : 1.Rapat anggota 2.Pengurus 3.Pengawas
Lingkup wilayah operasional	Hanya sebatas di lingkungan desa adat/pakraman	Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia	Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
Orientasi Usaha	Lembaga non-profit, yang bersifat sosio kultural	Profit	Bersifat profit untuk mensejahterakan anggota-anggotanya
Pembagian Keuntungan	Untuk pengelolaan modal dan pembangunan kesejahteraan masyarakat desa adat	Pembagian keuntungan di antara para pemegang saham sesuai dengan persentase saham yang dimiliki	Berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk masing-masing anggota.



Pelayanan nasabah LPD PEcatu



Kepala LPD Pecatu, I Ketut Giriarta menyampaikan informasi dan laporan seputar perkembangan LPD kepada krama desa dalam paruman desa.

Di Bawah Payung 'Pararem' Desa Adat

Sabtu Wage *wuku* Dukut, 25 April 2015 menjadi hari bersejarah bagi LPD Desa Adat Pecatu. Pada hari itu ditetapkan *Pararem Pangele* Desa Adat Pecatu tentang LPD Desa Adat Pecatu. Ini mempertegas dan memperjelas kedudukan LPD Pecatu sebagai wadah khusus *duwe* (milik) Desa Adat Pecatu.

Bendesa Adat Pecatu, I Ketut Murdana menjelaskan *pararem pangele* ini disusun karena keberadaan LPD belum diatur secara khusus dalam *Awig-Awig* Desa Adat Pecatu. Pasalnya, *awig-awig* disahkan pada 4 Novembr 1987, sedangkan LPD baru terbentuk pada 12 Desember 1988.

Sebelumnya, kata Murdana, sudah ada *Pararem* Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pecatu yang disepakati dan disahkan tanggal 29 April 2001. Akan tetapi karena perubahan dan perkembangan zaman, *pararem* tahun 2001 itu dipandang perlu untuk disesuaikan.

"*Pararem pangele* ini juga sebagai respons atas diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang pada Bab XIII, Pasal 39, ayat (3) secara tegas dan jelas mengkhususkan sekaligus mengakui keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali berdasarkan hukum adat.

Selain itu, telah ada Keputusan *Paruman Agung* III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor: 007/SK-PA III/MDP Bali/VIII/2014 tentang *Pararem* Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali sebagai payung hukum adat Bali terhadap keberadaan LPD di Bali sekaligus pedoman sistem tata kelola LPD yang utuh sebagai *duwe* dan entitas usaha masyarakat adat Bali," kata Murdana.

Dengan disahkannya *pararem pangele* mengenai LPD Desa Adat Pecatu ini, diharapkan bisa dijaga kelangsungan kinerja LPD Pecatu supaya tetap berjalan dengan baik dan benar. Muara akhirnya, menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan *sakala* dan *niskala* (*moksartam jagaddhita*) seluruh masyarakat Desa Adat Pecatu, sesuai filosofi Trihita Karana.

Kepala LPD Desa Adat Pecatu, I Ketut Giriarta, S.Pd., M.M., bersyukur karena *Pararem Pangele* tentang LPD Desa Adat Pecatu sudah disahkan. Mulai saat ini, kata Giriarta, tidak perlu ada keraguan lagi mengenai kedudukan LPD sebagai wadah khusus Desa Adat Pecatu yang berlandaskan pada hukum adat. *Pararem* merupakan salah satu wujud hukum adat yang lazim dalam tradisi Bali.

"Kedudukan LPD Desa Adat Pecatu kini sudah jelas, tegas dan kuat. Dasar hukum adatnya jelas dan Negara juga mengakui dan mengayomi," kata Giriarta.

Pararem pangele ini juga memberikan pedoman dan pegangan yang jelas bagi pengurus dan karyawan LPD dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hak dan kewajiban desa adat serta *krama desa* telah diatur, begitu juga hak dan kewajiban pengurus serta karyawan LPD. •



Upacara ngaben massal Desa Adat Pecatu tahun 2009 yang dibiayai dari produk Tabungan Plus Ida (luran Dana) Ngaben (kiri). Penyerahan santunan kematian dari LPD Pecatu kepada krama yang sedang berduka (kanan).

Ingin Adat dan Budaya Bali Ajeg, **Pertahankan LPD!**

Meski praktik usahanya mirip dengan lembaga keuangan, LPD bukanlah sebuah lembaga keuangan seperti pada umumnya. LPD merupakan wadah khusus yang mengelola *duwe* (hak milik) desa pakraman berupa *pacingskremen*, *patus* dan surat-surat berharga lainnya. Pengelolaan *duwe* inilah yang digunakan untuk menyangga upaya menjaga keajegan adat dan budaya Bali di desa adat/desa pakraman.

Karena itu, menurut Kepala LPD Desa Adat Pecatu, I Ketut Giriarta, S.Pd., M.M., fungsi utama LPD bukanlah fungsi ekonomi apalagi sebatas fungsi keuangan, tetapi fungsi sosial-budaya-spiritual. “Itu sebabnya, kesuksesan LPD tidak semata-mata diukur dari keuntungan yang didapat, tapi sejauh mana LPD mampu menopang adat dan budaya di desa adat,” kata Giriarta.

Dijelaskan Giriarta, LPD bertujuan memperkuat ketahanan desa pakraman dalam melestarikan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur adat dan budaya Bali yang dijiwai agama Hindu. LPD juga membantu desa pakraman dalam mewujudkan *sukerta tata agama*, *sukerta tata parhyangan*, *sukerta tata pawongan* dan *sukerta tata palemahan*. Selain itu, LPD pun membantu *krama* desa pakraman mewujudkan *catur purusa artha*. Tujuan lainnya, LPD mendorong pemerataan kesempatan berusaha bagi setiap *krama* desa pakraman dengan penyediaan akses layanan keuangan yang mudah dan cepat, serta sesuai dengan nilai adat dan budaya Bali yang dijiwai agama Hindu.

“Jika kita ingin adat dan budaya Bali tetap terjaga, LPD harus kita pertahankan,” tegas Giriarta.

Bendesa Adat Pecatu, I Ketut Murdana pun menegaskan hal serupa. Menurutnya, tanpa LPD, Desa Adat Pecatu tidak akan bisa seperti sekarang. Berkat LPD, beban *krama* dalam mempertahankan adat dan budaya Bali di Desa Adat Pecatu menjadi lebih ringan.

“Kami di Pecatu sesungguhnya tidak punya *pelaba*. LPD inilah yang menjadi *pelaba* desa. Bahkan, karena LPD, desa kami kini bisa memiliki *pelaba* desa berupa tanah,” kata Murdana.

Untuk kegiatan pembangunan pura serta menyelenggarakan *aci* atau upacara di pura, *krama* kini tidak perlu lagi urunan. Bahkan, untuk menggelar upacara pengabenan dan nyekah secara massal, LPD menjadi penyokong dana utama.

Selain secara rutin memberikan dana pembangunan ke desa adat sebesar 20% dari laba, LPD juga memberikan dana sosial sebesar 5% dari laba setiap tahun. Di luar itu, masih ada kontribusi lain bagi desa adat dan *krama* desa. “Kini, banjar-banjar juga sudah mendapatkan dana pembinaan adat, budaya dan agama senilai Rp 200 juta per banjar. Sebelumnya Rp 150 juta. Kalau tidak ada LPD, kami tak mungkin bisa seperti ini,” kata Murdana.

Sesungguhnya pun, kata Murdana, keberadaan LPD sangat membantu pemerintah, khususnya dalam mempertahankan adat dan budaya Bali serta mensejahterakan *krama* desa adat. Karena itu, pihaknya secara tegas menyatakan LPD harus dipertahankan. Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, semestinya mendukung agar LPD tetap ajeg dan terus mampu berkontribusi bagi desa adat, *krama* desa, daerah dan bahkan Negara. •

I Ketut Murdana



Tanda Cinta LPD untuk Generasi Pecatu Berkualitas



Penyerahan beasiswa pendidikan LPD Pecatu kepada siswa SD dan SMP.

Kendati sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali, LPD Desa Adat Pecatu tidak hanya memikirkan aspek pembangunan ekonomi atau budaya di desa adat, tetapi juga pendidikan *krama* adat. Bagi LPD Pecatu, pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang sangat penting. Jika pendidikan *krama* adat bagus, secara otomatis akan berdampak pada lahirnya generasi berkualitas yang memiliki kesadaran kuat untuk menjaga adat dan budayanya termasuk memperkokoh LPD sebagai *duwe* (hak milik) desa adat.

Itu sebabnya, LPD Pecatu secara rutin memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada anak-anak usia sekolah di Desa Adat Pecatu. Beasiswa yang diberikan meliputi beasiswa prestasi dan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu.

“Program beasiswa pendidikan ini diberikan sejak tahun 1999,” kata Kepala Bagian Umum LPD Pecatu, I Wayan Suratman, S.E.

Awalnya, beasiswa diberikan kepada

orang tuanya yang kurang mampu. Program ini hasil kerja sama dengan SMP Ngurah Rai Pecatu. Mulai tahun 2013, beasiswa juga diberikan kepada siswa SMA dan mahasiswa perguruan tinggi. Sejak tahun 1999 hingga 2013, tercatat sebanyak 132 orang menerima beasiswa pendidikan dengan nilai total mencapai Rp 208.713.000.

Tahun 2014, beasiswa berprestasi diberikan kepada 108 siswa SD dan sembilan orang siswa SMP Ngurah Rai. Mereka adalah peraih juara I, II dan III

Penerima Beasiswa yang Telah Lulus/ Wisuda Tahun 2014

1. I Wayan Widiana (SMAN 1 Kuta Selatan)
2. NI Kadek Kristiana Dewi (IHDN)
3. Ni Wayan Tiariyani Giri (Undiknas)
4. I Kadek Ary Anggara (IKIP PGRI Bali)

Penerima Beasiswa yang Lulus/ Wisuda Tahun 2015

1. I Kadek Diantara (SMAN 1 Kuta Selatan)
2. Ni Putu Novia Periantini (SMAN 1 Kuta Selatan)

di tiap tingkatan kelas dari enam sekolah dasar (SD) di Desa Pecatu serta SMP Ngurah Rai Pecatu.

“LPD juga memberikan bantuan kepada siswa yang orang tuanya kurang mampu sebanyak delapan orang siswa,” kata Suratman.

Selain siswa SD dan SMP, beasiswa juga diberikan kepada siswa SLTA dan perguruan tinggi. Masing-masing siswa SLTA menerima Rp 1.500.000 per semester, sedangkan mahasiswa perguruan tinggi menerima Rp 2.500.000 per semester.

“Pada tahun 2014, siswa SLTA penerima beasiswa sebanyak empat orang dan perguruan tinggi sebanyak tujuh orang,” papar Suratman.

Untuk tahun 2015, LPD Pecatu kembali melakukan seleksi terhadap penerima beasiswa SLTA dan perguruan tinggi. Pemohon tingkat SLTA tercatat empat orang, yang lolos verifikasi dua orang. Pemohon tingkat perguruan tinggi tercatat 12 orang, yang lolos verifikasi sebanyak 10 orang. •

Penyerahan beasiswa pendidikan untuk siswa SLTA dan mahasiswa perguruan tinggi.





Prajuru desa, banjar serta tokoh-tokoh masyarakat mengikuti rapat pembahasan laporan triwulan II LPD Desa Adat Pecatu, 11 Juli 2015.

Tetap Bertumbuh Meski Ekonomi Melambat

► Kinerja Semester I LPD Pecatu

Banyak orang kini merasakan situasi perekonomian sepanjang semester I tahun 2015 cenderung melambat. Kementerian Keuangan mencatat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak Januari hingga Juni 2015 hanya 4,9%, di bawah target 5,3%. Bahkan, Bank Dunia mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia enam bulan pertama 2015 hanya sekitar 4,7%, meleset dari prediksi sebelumnya 5,2%.

Pertumbuhan ekonomi Bali memang di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia Provinsi Bali memperkirakan pada triwulan II-2015 perekonomian Bali tumbuh pada kisaran 5,53-6,53 persen, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya 7,88 persen triwulan IV-2014 dan 6,30 persen triwulan I-2015. Namun, secara umum masyarakat Bali juga merasakan betapa situasi ekonomi sedang turun.

Bagi banyak perusahaan, situasi ekonomi semacam ini tentu kurang menguntungkan. Tak terkecuali bagi lembaga yang bergerak di sektor

PERKEMBANGAN LPD PECATU (Juni 2015-Juni 2014)

	Juni 2015 Rp.	Juni 2014 Rp.	Pertumbuhan (%)
Aset	364.257.737.528	314.833.749.371	16
Tabungan	165.743.952.594	146.778.138.562	13
Sibermas	14.006.649.736	11.348.107.161	23
Simpanan Berjangka	116.748.000.000	100.652.400.000	16
Pinjaman	300.561.215.455	238.798.974.825	26
Laba	8.516.114.683	6.038.354.230	41

keuangan. Namun, LPD Pecatu sebagai lembaga khusus komunitas milik Desa Adat Pecatu tetap bisa bertumbuh di tengah pelambatan ekonomi.

“Kami sangat bersyukur karena LPD Pecatu tetap bisa mempertahankan kinerja usahanya, meskipun situasi makro dan mikro ekonomi sedang melambat,” kata Kepala LPD Pecatu, I Ketut Giriarta, S.Pd., M.M.

Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, papar Giriarta, tetap terlihat peningkatan. Dana tabungan naik sekitar 11% dari Rp 146,7 milyar pada Juni 2014 menjadi Rp 165,7 pada periode yang sama

menjadi Rp 116,7 miliar.

Kredit juga mengalami peningkatan sekitar 26%. Pada bulan Juni 2014, pinjaman yang disalurkan Rp 238,7 miliar menjadi Rp 300,5 miliar.

Dari sisi aset, LPD Pecatu masih bisa mencatatkan kenaikan sekitar 16%. Pada Juni 2014, nilai aset yang tercatat sebesar Rp 314,8 miliar meningkat menjadi Rp 364,2 pada Juni 2015.

“Laba yang berhasil diraih pun meningkat cukup signifikan sekitar 41% dari Rp 6 miliar pada Juni 2014 menjadi Rp 8,5 miliar pada Juni 2015,” kata Giriarta.

Giriarta optimistis, kinerja ini masih bisa dipertahankan hingga akhir tahun 2015. Setidaknya, bisa mempertahankan pencapaian laba Rp 12,9 miliar yang diraih tahun 2014 lalu. •

Rapat pembahasan laporan triwulan II LPD Desa Adat Pecatu, 11 Juli 2015.





Kepala LPD Pecatu, I Ketut Giriarta (kiri) menerima kenang-kenangan dari dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jember (Unej), foto kiri, dan dari HMJ Akuntansi FE Unud (kanan).

Unej dan Unud Intip Kunci Sukses LPD Pecatu

Dua Fakultas Ekonomi dari dua perguruan tinggi negeri (PTN) di Bali dan Jawa mengunjungi LPD Desa Adat Pecatu, sepanjang semester I 2015. Kunjungan pertama dari FE Universitas Jember pada 22 April 2015 dan kunjungan kedua dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Udayana (Unud) pada 24 Juni 2015. Kedatangan kedua fakultas itu untuk mengintip kunci sukses pengelolaan LPD Pecatu.

Kunjungan kedua fakultas itu diterima langsung Kepala LPD Pecatu, I Ketut Giriarta didampingi staf terkait. Giriarta pun berbagi cerita seputar pengalaman 26 tahun mengelola LPD Pecatu.

Menurut Giriarta, kesuksesan LPD sebagai lembaga keuangan milik komunitas adat Bali tidak terlepas dari modal sosial yang dimiliki masyarakat Bali. Modal sosial itu tiada lain adat dan budaya Bali yang ditopang keberadaan lembaga komunitas adat berupa desa adat serta banjar adat.

Giriarta menjelaskan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan (*manayama braya* dan *pasikian pasobayan*), keikhlasan dan kejujuran (*lascarya*) dalam mengabdikan untuk kepentingan desa adat sangat kuat di kalangan masyarakat Bali. Nilai-nilai ini juga menjadi penopang eksistensi dan

perkembangan LPD.

Menurut Giriarta, meski sepiantas dalam praktiknya menyerupai bank atau koperasi, sesungguhnya LPD jauh berbeda dengan bank dan koperasi. Jika bank berdasarkan kepemilikan saham dan koperasi berdasarkan simpanan wajib dan simpanan sukarela, permodalan LPD berasal dari desa adat dengan didukung bantuan pemerintah sebagai bentuk fungsi pengayoman dan perlindungan.

"Secara pribadi-pribadi, *krama* (warga) desa adat tidak ada mengeluarkan dana untuk modal LPD, tapi sebagai *krama* desa, mereka ikut memiliki LPD," kata Giriarta.

Karena struktur permodalan yang unik, keuntungan LPD tidak dibagi rata kepada seluruh warga desa adat. Keuntungan LPD dikembalikan untuk memperkuat adat dan budaya Bali dengan basis utama desa adat. Itu sebabnya, LPD di Bali bukanlah lembaga keuangan murni, tetapi lembaga adat yang mengemban fungsi keuangan komunitas adat berbasis desa adat.

Dosen FE Universitas Jember yang mendampingi kunjungan mahasiswa Herman Cahyo menyatakan apa yang dilakukan LPD Pecatu menjadi ilmu baru bagi pihaknya karena sebuah lembaga keuangan bisa sukses dengan modal sosial. Hal ini, menurut Herman Cahyo, cukup unik dan menarik. Pasalnya, di daerah lain, lembaga sejenis tidak sesukses LPD di Bali. Herman Cahyo

sepakat modal sosial menjadi salah satu kunci kesuksesan LPD di Bali.

Hal senada dikemukakan Ketua HMJ Akuntansi FEB Unud, I Wayan Eka Suputra Yasa. Pihaknya tertarik mempelajari pengelolaan akuntansi di LPD Pecatu hingga bisa mengantarkan lembaga ini sukses seperti sekarang. •





Anak-anak muda Pecatu memadati lapangan Kuru Setra Desa Pecatu mengikuti acara "Pecatu Creative Day 2015".

“Creative Yes, Narkoba No!”

Gerakan antinarkoba itu menggema di Pecatu. Sabtu, 27 Juni 2015, di Lapangan Kuru Setra Desa Pecatu, anak-anak muda Pecatu yang dikoordinir Karang Taruna Sari Bhuwana bersama Fasilitator Badan Narkotika Nasional (FBNN) Desa Pecatu menggelar acara bertajuk “Pecatu Creative Day 2015”. Dengan mengusung tema “Creative Yes, Narkoba No!”, generasi muda Pecatu itu menampilkan berbagai kreativitas seni dan budaya sembari mengkampanyekan hidup lebih baik tanpa narkoba.

Ketua Pelaksana, I Wayan Putra Adnyana menjelaskan “Pecatu Creative Day 2015” dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman bagi para pemuda dan masyarakat Pecatu mengenai ancaman bahaya narkoba. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memacu kreativitas para pemuda Pecatu agar mau terus berkarya dan menjauhi narkoba.

“Bali menjadi salah satu kawasan wisata internasional yang rentan sebagai pintu masuk penyebaran narkoba dari sindikat narkoba internasional. Pecatu

merupakan destinasi wisata yang sedang berkembang sehingga perlu dibentengi dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” kata Putra Adnyana.

Selain itu, imbuhan Putra Adnyana, kegiatan ini juga untuk meluruskan persepsi yang keliru yang berkembang di masyarakat mengenai para pecandu narkoba. Menurut Putra Adnyana, para pecandu narkoba itu merupakan korban. Mereka tidak berniat kriminal, orang sakit, mereka sudah kehilangan masa lalu dan kehilangan masa kini. “Jangan sampai kehilangan masa depan mereka. Mereka seharusnya tidak di lapas (lembaga permasyarakatan), tetapi direhabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun sosial,” kata Putra Adnyana.

Ketua Karang Taruna Sari Bhuwana Desa Pecatu, I Nyoman Yoga Puniantara menambahkan, mengembangkan

berbagai kegiatan kreatif merupakan cara terbaik untuk menjauhkan anak-anak muda dari bahaya narkoba. Karena itu, Karang Taruna Sari Bhuwana bersama FBNN Desa Pecatu menggelar “Pecatu Creative Day 2015”. Kegiatan dimeriahkan dengan berbagai acara, seperti penyuluhan dan pameran narkoba, pemutaran film dokumenter, aneka kuliner dan produk, pameran kreativitas, *dance zumba* dan *body combat*, *juggling perform*, *foto selfie*, *fruit carving* serta pentas band.

Kegiatan ini didukung penuh LPD Desa Adat Pecatu. Biaya pelaksanaan kegiatan ditanggung LPD Pecatu. Kepala LPD Pecatu, I Ketut Giriarta mengatakan LPD memang berkomitmen mendukung kegiatan positif generasi muda.

“Kami menyambut baik inisiatif para pemuda ini dan berharap kegiatan serupa akan muncul lagi sebagai upaya menumbuhkan generasi muda Pecatu yang kreatif,” tandas Giriarta.

Acara yang berlangsung hingga tengah malam ini disambut antusias anak-anak muda dan warga Desa Pecatu. •



I Gede Arya Kurniawan "Valentino Rossi" dari Pecatu

Anak-anak muda yang suka balapan identik dengan ugal-ugalan. Namun, I Gede Arya Kurniawan, pemuda Pecatu kelahiran 28 Mei 1984 mampu menepis pandangan buruk itu. Kesukaannya pada aksi balapan motor di jalan justru mengantarnya meraih prestasi hingga mengharumkan nama Pecatu dan Bali di ajang balap motor nasional.

Momentum yang paling berkesan bagi Arya tiada lain tatkala dirinya meraih Juara I Nasional Indoprix 2014. "Mencapai posisi puncak di ajang ini sangat sulit karena harus menghadapi para *rider* terbaik dari masing-masing provinsi. Sejak ikut ajang ini pada tahun 2011, saya hanya mampu meraih posisi juara II. Tahun 2014, saya berhasil mewujudkan mimpi mencapai puncak," kata Arya dengan

bangga.

Sebelumnya, Arya sudah mengoleksi berbagai prestasi dalam ajang balap motor, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Di tingkat lokal, Arya meraih medali emas dalam ajang Pekan Olah Raga Provinsi (Proprov) Bali 211 dan 2013. Di tingkat regional, Arya juga meraih Kejurnas Region III 2004—2008. Di ajang PON 2008 di Kalimantan Timur (Kaltim), Arya meraih medali perak dan perunggu.

Segudang prestasi itu tidak diraih Arya dengan mudah, tapi dengan kerja keras dan disiplin. Warga Banjar Dinas Tengah Pecatu ini terbilang tidak mudah menyerah.

"Moto hidup saya memang begitu. Jangan pantang menyerah. Lakukan pekerjaan dengan serius dan disiplin," kata Arya yang mengidolakan pebalap, Valentino Rossi.

Selama ini, orang memandang miring hobi balap motor. Arya yang biasa dipanggil Ucil ini menampilkan keras hal itu. Menurutnya, jika ditekuni dengan serius, hobi balap motor bisa menjadi pekerjaan dan mewakili daerah dalam ajang kompetisi tingkat nasional bahkan internasional.

Arya mulai tertarik dengan dunia balap motor saat duduk di bangku kelas III SMP. Namun, sejak kecil, Arya sudah sering diajak menyaksikan pertandingan balap motor oleh ayahnya, I Nyoman Suandika.

Kendati begitu, sang ayah sempat tidak mendukung keinginan Arya terjun ke dunia

balap motor. Namun, Arya berhasil meluluhkan hati ayahnya setelah mampu menunjukkan prestasi dalam ajang kompetisi balap motor. Ibunya, Ni Nyoman Kawi serta keluarganya yang lain juga memberikan dukungan.

Karena itu, Arya tetap tampil di berbagai ajang balap motor sembari mengelola usaha jasa transportasi pribadi untuk menyambung kehidupan sehari-hari. Dia masih menyimpan harapan bisa tampil dalam ajang kejuaraan balap yang lebih bergengsi.

"Secara pribadi saya berharap Bali memiliki sirkuit sendiri sehingga bisa menjadi tuan rumah ajang balapan bergengsi, baik nasional maupun internasional," tandas Arya. •





Sebagian palinggih Pura Selonding yang akan dipugar total.

Desa Adat Pecatu, kata Murdana, memperkirakan anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan fisik mencapai Rp 4 miliar. Anggaran itu belum termasuk biaya upacara setelah pura selesai dipugar.

Pihaknya merencanakan pembangunan fisik dilaksanakan selama setahun. Selanjutnya, upacara *pamlaspas* maupun *ngenteg linggih* akan dilaksanakan bertepatan dengan *pujawali* di Pura Selonding pada tahun 2016 mendatang.

Untuk sementara sumber dana berasal dari kas desa adat. "Sampai saat ini, biaya sepenuhnya merupakan swadaya desa adat. Belum ada bantuan dari pihak-pihak lain, termasuk dari pemerintah," imbuh Murdana.

Murdana berharap *krama* Desa Adat Pecatu mendukung kegiatan pemugaran total Pura Selonding. Murdana menegaskan

Rp 4 Miliar untuk Pemugaran Pura Selonding

Pura Selonding menjadi salah satu pura *prasanak* Pura Luhur Uluwatu yang bernilai historis tinggi. Sayangnya, kondisi pura ini sudah tidak representatif lagi. Selain areal pura yang sempit, beberapa bangunan pura juga terlihat sudah cukup tua.

Karena itu, *krama* Desa Adat Pecatu bersepakat untuk memugar total pura yang terletak di Banjar Kangin ini. Selain dipugar total, areal pura juga diperluas agar *krama* bisa lebih nyaman beraktivitas di dalam pura. Pemugaran sudah dimulai sekitar Mei lalu.

Bendesa Adat Pecatu, I Ketut Murdana menjelaskan pemugaran total Pura Selonding memang sudah menjadi program desa adat. "Melihat kondisi pura, memang sudah waktunya dilakukan pemugaran. Sekalian dipugar, areal pura juga diperlebar agar lebih representatif," kata Murdana.

Selama ini, kata Murdana, Pura Selonding sudah beberapa kali direnovasi. Namun, perbaikan dilakukan secara ringan, seperti merenovasi atap yang rusak. Kini, perbaikan dilakukan secara menyeluruh.

perbaikan Pura Selonding merupakan bagian dari upaya mewujudkan *sukerta tata parhyangan* di Desa Adat Pecatu. Dari situ akan terwujud *sukerta tata palemahan* dan *sukerta tata pawongan*.

Pura Selonding tergolong sebagai pura *prasanak* Pura Luhur Uluwatu. Sejarah pura ini kerap dikaitkan dengan perjalanan suci Danghyang Nirartha. Pendirian Pura Selonding diduga sezaman dengan Pura Kulat, Pura Parerepan, Pura Batu Diji dan lainnya. •





Pelayanan nasabah di Bank Sampah Tambyak Lestari (kiri). Ketua Pengelola Bank Sampah Tambyak Lestari, I Nyoman Mawa (kiri) berbincang dengan Sekretarisnya, I Made Lasir (kanan) di gudang Bank Sampah Tambyak Lestari (kanan).



Memetik Rupiah dari Sampah

Potret Bank Sampah Tambyak Lestari

Sampah identik dengan masalah. Bahkan, tak jarang juga menjelma musibah. Namun, bagi I Nyoman Mawa, sampah mendatangkan berkah. Dari sampah, Mawa bisa memetik rupiah. Tak cuma itu, Mawa juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi lingkungannya melalui Bank Sampah Tambyak Lestari.

Kisah Mawa bermula pada tahun 1997. Kala itu, masyarakat di Pecatu kesulitan mendapatkan pakan ternak, seperti pakan ternak sapi dan babi karena kemarau yang panjang. Kondisi itu memunculkan ide untuk memanfaatkan sampah-sampah hotel dan restoran yang ada di Pecatu, terutama sampah organik dan sisa-sisa makanan restoran. Sampah nonorganik seperti plastik dan kaleng bekas serta besi bisa didaur ulang sehingga menghasilkan uang.

Mawa yang ketika itu baru saja berhenti bekerja di hotel pun mulai membuka usaha kecil-kecilan di bidang pengelolaan sampah, khususnya sampah hotel. Sampah-sampah itu digunakan sebagai pakan ternak. “Kala itu, di Pecatu sedang musim kemarau yang sangat kuat sehingga warga Pecatu sulit mendapatkan pakan ternak babi dan sapi,” cerita Mawa.

Kegigihan Mawa mengurus usaha pengelolaan sampahnya mulai berbuah. Pada tahun 2010, pemerintah memperkenalkan konsep Bank Sampah. Usaha yang dikelola Mawa pun dijadikan percontohan. Pengelolaan pun dilakukan di bawah binaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Badung. Usaha Mawa resmi menggunakan bendera Kelompok Sosial Masyarakat (KSM) 3R Tambyak Lestari. Tapi, usaha ini lebih umum disebut Bank Sampah Tambyak Lestari.

“Secara resmi, Bank Sampah Tambyak Lestari didirikan pada 22 Februari 2010,” kata I Made Lasir, sang sekretaris yang juga prajuru Desa Adat Pecatu.

Memang, diakui Mawa dan Lasir, warga belum banyak yang memahami arti penting bank sampah. Itu sebabnya, jumlah nasabah warga di Tambyak Lestari masih sedikit, hanya 40 orang. “Dengan menjadi nasabah bank sampah warga belajar memilah sampah dan menjadikan sampah-sampah itu bernilai ekonomis,” kata Lasir.

Namun, Mawa yakin kesadaran mengenai sampah akan semakin tumbuh di kalangan masyarakat. Terlebih lagi kini Bank Sampah Tambyak Lestari sudah berkembang pesat. Ada 21 hotel di wilayah Pecatu yang bekerja sama dengan bank sampah ini. Armadanya pun bertambah, kini sebanyak tiga unit. Jumlah karyawannya sebanyak 11 orang. Berkat bantuan Bupati Badung, Bank Sampah Tambyak Lestari kini sudah memiliki gudang tempat pengelolaan sampah yang jauh lebih representatif.



Penghargaan dari Bupati Badung kepada Bank Sampah Tambyak Lestari.

“Selain bantuan Pemkab Badung, kami banyak dibantu oleh LPD Pecatu. Melalui fasilitas kredit di LPD Pecatu, kami bisa menambah armada sampah. Bahkan, awal pendirian bank sampah ini juga menggunakan sumber dana pinjaman dari LPD Pecatu,” tandas Mawa. •



Tim kredit LPD Pecatu siap melayani nasabah Kredit Krama Pecatu Sejahtera (KKPS).

Merintis Usaha Kecil Bersama KKPS LPD Pecatu

Jika sejumlah lembaga perbankan memiliki kredit usaha rakyat (KUR), LPD Desa Adat Pecatu juga memiliki produk serupa. Namanya, Kredit Krama Pecatu Sejahtera (KKPS). Krama Pecatu yang tidak memiliki agunan atau jaminan bisa mendapatkan kredit maksimal Rp 20 juta dengan hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat rekomendasi dari *kelian* banjar adat. Produk ini cocok bagi krama yang ingin merintis usaha kecil tetapi tidak memiliki jaminan.

KKPS diluncurkan sejak tahun 2005 yang pada awalnya diberikan kepada pedagang-pedagang di kios objek wisata Uluwatu. Pada 10 Februari 2014 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala LPD Desa Adat Pecatu No. 04 /SK/LPD-DAP/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Skim Pemberian KKPS sebagai penyesuaian aturan pemberian dan jumlah flafond KPPS. Produk ini dimaksudkan untuk memacu perkembangan usaha-usaha kecil yang produktif *krama* Desa Pecatu serta memotivasi *krama* mengembangkan jiwa wiraswasta sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk optimalisasi pendapatan.

“KKPS juga untuk menghindarkan *krama* dari sistem ijon yang memberatkan

agunan/jaminan. “Jaminannya adalah sebagai *krama* Desa Adat Pecatu,” imbuh Giriarta.

Namun, untuk menghindari risiko kredit, debitur diwajibkan mengasuransikan kreditnya. Jika terjadi kredit terklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet disampaikan kepada *Kelian* Desa Adat/Badan Pengawas/*Kelian* Banjar adat/Badan Pembina untuk dilakukan Pembinaan dan sesuai rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas dan Badan Pembina Internal/Tingkat Desa. Bagi kredit yang terkategori macet dan telah dilakukan pembinaan serta penagihan wajib diumumkan pada *paruman* Desa Adat maupun Banjar Adat.

“Apabila terjadi Kredit Macet oleh peminjam akan dikonvensasi dengan tugas *ayah-ayahan* Desa yang wajib dilaksanakan oleh peminjam sesuai hasil *paruman para juru* Desa Adat Pecatu,” kata Kepala LPD Pecatu, I Ketut Giriarta, S.Pd., M.M..

sekaligus serta pemerataan pembangunan masyarakat Desa Pecatu,” kata Kepala Bagian Kredit, I Made Astika, S.E.

KKPS, kata Astika, menyasar *krama* yang tidak *bankable* atau tidak mempunyai

Maksimal plafond kredit yang dapat disalurkan kepada *krama* sebesar Rp. 20 juta per orang. Jangka waktu kredit maksimal 3 Tahun (36 Bulan). Suku bunga 15,6 % per – tahun atau 1,3% per bulan menurun dihitung dari sisa pinjaman. •

Syarat-syarat KKPS

1. Kredit hanya dapat diberikan kepada krama Desa Adat Pecatu/kelompok usaha yang ada di Desa Pecatu.
2. Permohonan kredit atas nama perorangan/dikoordinir oleh kelompok serta diketahui oleh ketua kelompok atau *kelian* banjar adat.
3. Permohonan kredit dilampiri dengan persetujuan dari suami/istri/orang tua/wali.
4. Memiliki rekening tabungan atau wajib menabung dengan setoran awal/saldo minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Umur maksimal 60 tahun.

Kredit Krama Pecatu Sejahtera (KKPS) cocok untuk membuka usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk warung kelontong.





Warisan Itu Tanggung Jawab Dulu, Baru Hak

I Ketut Giriarta

Warisan sejak lama ditanggapi secara salah kaprah. Tatkala mendengar kata warisan, yang terlintas di pikiran orang umumnya berupa hak yang didapat dari orang tua atau leluhurnya. Karena identik dengan hak, tak jarang warisan kemudian memicu konflik dengan sesama saudara. Bahkan, pernah terbetik kabar seorang anak menggugat ibu kandungnya sendiri ke pengadilan hanya untuk mendapatkan hak warisan. Hubungan kekerabatan bahkan hubungan darah pun hancur gara-gara masalah warisan.

Padahal, dalam tradisi Bali, warisan bukan semata-mata hak. Hal pertama dan utama dalam warisan justru tanggung jawab. Warisan adalah kewajiban yang dilimpahkan kepada generasi penerus sebagai upaya menjaga eksistensi keluarga. Tanggung jawab umumnya bersifat sosial, kultural dan spiritual, seperti merawat orang tua dengan kasih sayang, menggelar upacara penguburan, *pengabenan* dan *ngelinggihang dewa hyang*, serta melanjutkan tugas-tugas memelihara dan menggelar aci atau upacara di pura.

Sadar akan beban yang ditimpakan kepada generasi penerus, para leluhur memberikan hak pengelolaan terhadap aset turun-temurun yang dimiliki. Pengelolaan aset itu digunakan untuk menopang berbagai tanggung jawab yang dibebankan kepada generasi kini.

Di Bali muncul istilah *ngewaris*. Istilah ini tidak serta-merta berarti menghaki segala hal yang dimiliki orang tua. Istilah *ngewaris* mengandung pengertian melanjutkan. Warisan bukan untuk dijual, tetapi dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Ini sejalan dengan konsep *heritage* atau warisan budaya yang maknanya juga melanjutkan tanggung jawab merawat atau menjaga.

Dalam adat Bali, warisan baru dikelola setelah orang tua meninggal dan berbagai upacara pembersihan dan penyucian sudah selesai dilakukan. Termasuk juga telah menyelesaikan berbagai utang-utang yang dimiliki orang tua semasa hidup, baik utang secara *sekala* maupun secara *niskala*. Utang *sekala* misalnya berupa pinjaman pada pihak-pihak tertentu mesti diselesaikan dulu agar nama baik orang tua tetap terjaga. Utang *niskala* menyangkut janji atau kaul yang pernah dilontarkan orang tua tetapi belum sempat ditunaikan semasa hidupnya.



Karena itu, mereka yang menerima warisan selayaknya tidak serta-merta menyambutnya dengan girang. Penerima warisan sesungguhnya sedang menerima beban tanggung jawab yang berat. Jika seseorang tidak bisa mengemban tanggung jawabnya itu, hak warisannya juga gugur. Itu sebabnya, mereka yang telah keluar dari keluarga atau berpindah agama, dalam hukum adat Bali tidak berhak menerima warisan.

Beban yang lebih berat lagi, penerima warisan harus bisa menjaga warisan yang diterima tetap bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Jika ini tak bisa dilakukan, dia akan tercatat sebagai pewaris yang gagal. •



Segenap Pengurus dan Karyawan
LPD Desa Adat Pecatu
Mengucapkan

Om Swastyastu,

Rahajeng Nyangra
Rahina Galungan Lan Kuningan

Dumogi Ida Sang Hyang Widi Wasa Ngicening Kerahayuan
Lan Kerahajengan Sareng Sami

Om Shantih, Shantih, Shantih, Om

“ Produk LPD Desa Adat Pecatu ”

SIMPANAN

- Tabungan
- Sibermas
- Deposito

KREDIT

- Kredit Modal Kerja
- Kredit Investasi
- Kredit Konsumtif
- Kredit Krama Sejahtera

PPOB

- Listrik
- Telpn
- PDAM

